



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

KOMITMEN INDONESIA SEBAGAI KONTRIBUTOR PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN

Rizki Roza

Analisis Legislatif Ahli Madya
rizki.roza@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin langsung Delegasi Indonesia menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly/UNGA) ke-80 di markas PBB di New York, Amerika Serikat (AS). Rangkaian sidang yang berlangsung pada 22–27 September 2025 menjadi panggung penting untuk menunjukkan kiprah diplomatik Indonesia di tingkat global. Setelah satu dekade Presiden Republik Indonesia tidak turut menghadiri secara langsung UNGA, kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut menjadi sorotan. Selain karena kehadiran Presiden Prabowo dianggap sebagai momentum diplomasi Indonesia untuk memperkuat peran internasional Indonesia, isi pidato Presiden Prabowo juga cukup mendapat perhatian luas dunia internasional. Pernyataan Presiden Prabowo mengenai komitmen dan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada pasukan penjaga perdamaian PBB menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian.

Mendapat posisi terhormat sebagai pembicara ketiga dalam sesi General Debate UNGA, posisi strategis karena memiliki perhatian tinggi dari delegasi internasional, Presiden Prabowo di antaranya menyampaikan bahwa Indonesia siap mengirimkan 20 ribu, bahkan lebih, pasukan penjaga perdamaian ke Gaza atau daerah konflik lainnya di dunia. Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia siap menanggung beban, berkontribusi tidak hanya dengan tenaga manusia, tetapi juga melalui kontribusi finansial. Ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensi Indonesia untuk turut aktif berkontribusi pada perdamaian global, tidak hanya melalui diplomasi, tetapi juga dengan penempatan pasukan di lapangan.

Keterlibatan Indonesia dalam operasi perdamaian PBB bukan hal baru. Indonesia sudah memiliki rekam jejak panjang dalam kontribusi terhadap operasi penjaga perdamaian PBB (*peacekeeping operations*). Indonesia pertama kali bergabung dalam misi PBB pada tahun 1957 di Mesir. Pada tahun 1956, PBB membentuk United Nations Emergency Force I (UNEF I). Indonesia bergabung setahun kemudian, menjadi misi pertama Kontingen Garuda I. Sejak itu, Indonesia telah menempatkan puluhan ribu personel TNI dan Polri di berbagai belahan dunia. Di tahun 2025 tercatat lebih dari 2.700 personel aktif ditempatkan di sejumlah misi, antara lain di Lebanon (UNIFIL), Republik Demokratik Kongo (MONUSCO), Sudan Selatan (UNMISS), serta Republik Afrika Tengah (MINUSCA). Dengan kontribusi tersebut, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 10 negara penyumbang pasukan terbesar bagi PBB.

Meskipun sudah memiliki rekam jejak yang panjang dan diakui sebagai salah satu penyumbang pasukan terbesar, pernyataan kesiapan untuk mengirimkan hingga lebih dari 20 ribu personel merupakan peningkatan peran yang sangat signifikan. Tidak banyak operasi PBB yang melibatkan lebih dari 20 ribu personel dalam satu misi, dan operasi PBB yang melibatkan lebih dari 20 ribu personel biasanya merupakan gabungan multinasional. Selain Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Ethiopia, dan Rwanda juga tercatat sebagai penyumbang pasukan terbesar, tetapi tidak pernah mencapai 20 ribu personel untuk satu misi. Namun demikian,

pernyataan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi besar bagi misi pasukan penjaga perdamaian PBB merupakan cerminan kesiapan nyata Indonesia untuk turut menghadapi risiko dan tanggung jawab di lapangan, dan menunjukkan keinginan Indonesia untuk lebih proaktif dalam keamanan internasional dan misi perdamaian.

Setiap pengerahan pasukan penjaga perdamaian harus berdasarkan mandat resmi dari Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB. Indonesia tidak dapat bergerak sendiri, melainkan harus dalam koridor legalitas PBB. Sebagaimana juga telah disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya, komitmen Indonesia ini hanya dapat terlaksana jika mendapat mandat resmi dan memiliki kerangka hukum yang jelas. Sementara itu, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk memenuhi jika seketika menerima mandat dari PBB. Indonesia harus mampu mengatasi berbagai tantangan praktis yang tidak mudah dihadapi dalam waktu singkat, seperti logistik, transportasi, pelatihan, peralatan, hingga pembiayaan agar dapat merealisasikan komitmen yang telah disampaikan dan memenuhi ekspektasi masyarakat internasional.

Atensi DPR

Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam operasi multinasional. Namun, komitmen pengerahan 20 ribu personel merupakan tantangan terbesar dalam sejarah kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian PBB. Untuk merealisasikan komitmen ini dan menjaga kepercayaan internasional, Indonesia membutuhkan kesiapan yang signifikan. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI perlu memberikan perhatian serius terhadap komitmen yang telah disampaikan pemerintah. Komisi I DPR RI perlu meminta penjelasan menyeluruh dari Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, serta Kementerian Luar Negeri mengenai kesiapan operasional, logistik, dan sumber daya manusia. Komisi I DPR RI juga perlu memastikan adanya perencanaan anggaran yang realistis, termasuk mekanisme pembiayaan awal sebelum biaya misi dikompensasi oleh PBB. Selain itu, melalui peran diplomasi parlemen, DPR RI perlu turut membangun dukungan politik internasional, sehingga komitmen Indonesia untuk berkontribusi mendapat legitimasi penuh dari PBB. DPR RI perlu memastikan komitmen besar ini menjadi instrumen diplomasi yang efektif bagi Indonesia dalam upaya mewujudkan kemerdekaan Palestina, tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi kepentingan nasional Indonesia.

Sumber

aljazeera.com, 24 September 2025;
antaranews.com, 21 September 2025;
kemlu.go.id, 23 September 2025;
peacekeeping.un.org, Agustus 2025;
reuters.com, 23 September 2025;
thejakartapost.com, 25 September 2025.



EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

Devindra R. Oktaviano
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*